

KELUARNYA AMERIKA SERIKAT DARI KESEPAKATAN TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP DI MASA PEMERINTAHAN DONALD TRUMP

Dira Triana¹
NIM. 1302045217

Abstract

This research aims to explore the backgrounds of the United States Withdrawal from the Trans-Pacific Partnership Under the Presidency of Donald Trump. The analysis level uses an individual level and also use the concept of decision-making theory. The techniques of data collection used by the author are using literature review techniques which are based on books and internet media through valid sites. The result of this research shows that the reasons Donald Trump decided to withdraw the United States from the Trans-Pacific Partnership agreement were to increase the US economy and also wanted to make the US great again, solving the the pros and cons of TPP in the society and aplly the Trump's protectionism policy. Through the findings of this research shows that Donald Trump wanted to make his vision and mission which is to bring back the power of US economy as a number one in the entire world became true.

Keywords: *Trans-Pacific Partnership, Donald Trump*

Pendahuluan

Kesepakatan *Trans-Pacific Partnership* (TPP), merupakan perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Area*) yang dibentuk pada tahun 2008. Organisasi ini beranggotakan 12 negara, yaitu : Selandia Baru, Chili, Singapura, Brunei Darussalam, Amerika Serikat, Peru, Meksiko, Kanada, Jepang, Australia, Vietnam dan Malaysia. TPP merupakan kerjasama standar tinggi. Hal ini dikarenakan kerjasama TPP merupakan perjanjian yang mengikat yang berusaha untuk menghapus biaya pajak hingga 0% untuk perdagangan barang, jasa, serta membangun dan memperluas peraturan yang membahas berbagai masalah termasuk hak kekayaan intelektual dan investasi asing. Apabila negara-negara anggota menyalahi kesepakatan tersebut maka mereka dapat dikenai sanksi ekonomi. Kesepakatan yang dibuat didalamnya merupakan standar dimana TPP dituntut untuk mampu setara dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah ada sebelum TPP seperti WTO, perjanjian bilateral dan kerjasama regional lainnya (<http:koran-sindo.com>, diakses 04 Desember 2018).

Sebelum TPP terbentuk, kerjasama ini bernama *Trans Pacific Strategic Economic Partnership* (TPSEP). Kemudian, nama TPSEP berubah menjadi TPP saat terjadinya

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mualwarman. E-mail : triana.sh_dira@yahoo.co.id

perluasan anggota pada tahun 2008 (Deborah d. C. L. L., 2012). Secara umum, perjanjian perdagangan bebas TPP mempunyai tujuan yang tidak berbeda dengan TPSEP, diantaranya penghapusan tarif dan hambatan perdagangan lainnya sehingga konsumen dapat mendapatkan barang atau jasa dengan biaya yang murah. Hal ini dikarenakan TPP merupakan kelanjutan dari perjanjian TPSEP.

Bergabungnya AS dalam TPP di tahun 2008, disebabkan pergeseran arah kebijakan ekonomi AS ke kawasan Asia Pasifik yang sebelumnya berfokus pada negara Eropa yang kemudian beralih ke Amerika Selatan, khususnya Meksiko di tahun 1990. Memasuki tahun 2000, kawasan Asia Pasifik mengalami pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) yang hampir sebanding dengan angka pertumbuhan GDP di AS. Hal tersebut membuat fokus kebijakan ekonomi AS beralih ke Asia Pasifik (www.provitstraining.com, diakses 15 Agustus 2017).

Namun, keanggotaan AS dalam APEC belum cukup optimal untuk mendukung perekonomian AS. Oleh karena itu, AS masuk menjadi anggota TPP. Keikutsertaannya dalam TPP ini mampu membantu peningkatan ekspor AS di bidang agrikultur, peternakan, industri manufaktur, kosmetik, serta makanan dan minuman (<https://ustr.gov>, diakses 25 Juli 2017).

AS bergabung di dalam TPP terhitung selama 9 tahun. Namun, apa yang sudah berjalan dibawah pemerintahan Barack Obama tiba-tiba berubah ketika Donald Trump menarik diri dari TPP disaat ia mengeluarkan keputusan presiden atau "*Executive Order*" yang menyatakan menarik keluar AS dari pakta perdagangan yang beranggotakan 12 negara pada tanggal 23 Januari 2017. *Executive Order* merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh presiden sebagai kepala dari cabang eksekutif pemerintahan dimana keputusan ini tidak memerlukan persetujuan Kongres untuk diberlakukan (<https://m.kumparan.com>, diakses 15 Juli 2017).

Ketika AS Keluar dari TPP, Sebelas negara anggota TPP lainnya sangat kecewa dengan keputusan AS, terutama negara Jepang, Vietnam dan Malaysia. Semenjak keluarnya AS dari TPP, kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi baru untuk kelanjutannya dengan negara Cina dan India yang ingin ikut bergabung dan merubah kesepakatan TPP. Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe mengatakan bahwa TPP tanpa AS, telah kehilangan 250 juta konsumen (<http://katadata.co.id>). Keluarnya AS dari TPP menjadi menarik karena, seharusnya dengan keberhasilan AS dalam keanggotaan TPP dalam meningkatkan angka ekspor pasca krisis dapat membuat AS bertahan dalam TPP. Namun sebaliknya, AS justru keluar dari organisasi tersebut.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Konsep Pengambilan Keputusan (Decision Making)

Keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Dalam kamus besar ilmu pengetahuan pengambilan keputusan (*decision making*) didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif atau lebih karena seandainya hanya terdapat satu alternatif tidak akan ada satu keputusan yang akan diambil.

Adapun teori pembuatan keputusan dalam politik luar negeri para pembuat keputusan melakukan pilihan (seleksi) dari berbagai alternatif yang tersedia. Pembuatan keputusan meliputi upaya rekonsiliasi tujuan yang saling berlawanan, dan merupakan upaya menyesuaikan aspirasi dengan sarana yang tersedia dan mengakomodasi berbagai tujuan dan aspirasi yang berbeda dengan yang lainnya.

Dalam penjelasan lain, Graham T. Allison, mengajukan tiga model untuk mendeskripsikan proses pembuatan keputusan politik luar negeri, yaitu:

Model I Aktor Rasional, dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Pemerintah dianalogikan sebagai dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaah kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya, dan perhitungan untung rugi atas masing-masing alternatif tersebut. Dalam model ini digambarkan bahwa untuk melakukan pilihan-pilihan dan alternatif para pembuat keputusan menggunakan kriteria “optimalisasi hasil”.

Model II: Proses Organisasi Dalam model ini menggambarkan politik luar negeri sebagai hasil kerja suatu organisasi besar yang berfungsi menurut suatu pola perilaku. Pembuatan keputusan bukan semata-mata proses intelektual, lebih merupakan proses mekanis. Keputusan mekanis itu dalam konteks pembuatan keputusan politik luar negeri dilakukan dengan cara mekanis yang merujuk pada keputusan-keputusan yang telah dibuat dimasa lalu, prosedur rutin yang berlaku, atau pada peran yang ditetapkan bagi unit birokrasi itu. Inilah sebagai gambaran singkat pola perilaku yang disebut prosedur kerja baku (standard operating procedure).

Model III: Politik Birokratik merupakan proses tawar – menawar (bargaining games) antara pemerintah dengan agen pemerintah lainnya. Dimana proses tersebut merupakan proses saling mengemukakan alternatif untuk menetapkan kebijakan luar negeri atau dengan kata lain, pembuatan keputusan politik luar negeri, adalah sebuah proses sosial dan bukan merupakan proses intelektual.

Dari ketiga model di atas penulis mengambil model I untuk menjelaskan dan menjawab rumusan masalah. Model I (Aktor Rasional) dipilih karena lebih berorientasi pada individu sebagai pembuat keputusan. Keluarnya AS dari TPP oleh Donald Trump dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan sektor manufaktur AS.

“Make America Great Again” adalah tujuan dasar dari keputusan keluarnya AS dari TPP. Menurut Donald Trump dengan adanya tujuan dasar tersebut AS dapat menjadi negara yang lebih sejahtera dari sebelumnya. Oleh karena itu, orientasi optimalisasi hasil dan keuntungan ekonomi menjadi tujuan utama dalam pengambilan keputusan oleh Donald Trump.

Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode eksplanatif. Metode eksplanatif bertujuan untuk menemukan penjelasan tentang mengapa Donald Trump memutuskan untuk keluar dari TPP. Dalam melakukan penelitian dalam Hubungan Internasional harus dilihat dari permasalahan yang ada kemudian dikaitkan dengan teori atau konsep yang ada dalam teori yang ada dalam Hubungan Internasional. Level analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah level analisis individu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data kepustakaan (*library research*) yaitu, pengumpulan data yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan judul dan permasalahan penelitian dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, internet, literatur laporan bentuk yang terkait, dan lain sebagainya.

Hasil Penelitian

Trans-Pacific Partnership (TPP)

TPP merupakan perjanjian mengikat yang berusaha untuk menghapus segala biaya pajak hingga mencapai angka 0% di tiap negara anggota yang bergabung dalam TPP. Standar tinggi TPP ditetapkan dalam kesepakatan tentang perdagangan bebas yang tidak hanya mengatur aspek ekonomi, tetapi juga membahas masalah sosial dan lingkungan, HaKI dan standar perburuhan yang tercantum dalam bab isi kesepakatan TPP.

TPP mempunyai 30 bab isi kesepakatan yang diringkas menjadi 5 kesimpulan. Pertama, TPP mempunyai akses pasar yang komprehensif dimana TPP mengangkat isu yang berkaitan dengan perdagangan barang, serta hambatan tarif, sehingga dapat menciptakan peluang dan manfaat baru bagi pekerja, bisnis dan konsumen. Kedua, TPP melakukan pendekatan komitmen regional yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan pertumbuhan berkelanjutan di regional. Ketiga, TPP menempatkan tantangan perdagangan yang berfungsi untuk meningkatkan daya saing, fasilitasi bisnis usaha kecil dan menengah serta pengembangan dalam kompetisi di ekonomi global. Keempat, TPP merupakan perdagangan inklusif yang berfungsi untuk mempromosikan perdagangan dan investasi serta layanan inovatif yang berkaitan dengan ekonomi digital dan lingkungan. Dan yang kelima, TPP merupakan platform dalam integrasi regional yang memperbarui perjanjian sesuai untuk mengatasi masalah perdagangan di masa mendatang di kawasan negara anggota TPP.

TPP merupakan perjanjian perdagangan bebas bersifat ekspansif yang dibuat oleh negara anggota APEC, maka negara APEC maupun non-APEC dapat bergabung dalam TPP dengan mengikuti peraturan serta standar yang telah ditentukan di dalam kesepakatan TPP.

Sejak dibentuknya TPP tahun 2005 hingga di akhir tahun 2016, TPP telah melakukan berbagai kegiatan untuk mendorong ekspansi perdagangan di antara negara anggotanya. TPP melakukan kegiatannya dengan bernegosiasi antar negara anggota, adapun negosiasi yang dilakukan oleh TPP terhitung sebanyak 31 putaran dari tahun 2010 hingga tahun 2016. Negosiasi yang dilakukan oleh negara anggota membahas segala isu yang terdapat dalam perjanjian TPP seperti isu perdagangan, penghapusan

tarif, peningkatan ekspor, isu HaKI serta hak cipta, investasi, lingkungan, layanan keuangan, hak buruh, hambatan teknis dan telekomunikasi.

Selain melakukan regulasi kebijakan di tiap negara, TPP dengan gencar melakukan ekspansi perdagangan dan melakukan promosi ke berbagai negara lainnya. TPP melakukan promosi ke negara anggota APEC maupun non APEC yaitu Korea dan Indonesia dengan menawarkan insentif yang dimiliki oleh TPP dimana perjanjian ini merupakan negosiasi perdagangan bebas yang membantu meningkatkan perdagangan dan investasi serta mewujudkan kesejahteraan ekonomi.

Perekonomian Amerika Serikat

AS merupakan salah satu *developed country* yang mempunyai perekonomian terkuat di dunia. Perekonomian AS dibangun oleh sistem ekonomi liberal dimana AS melakukan kerjasama *freetrade* perdagangan diantara negara-negara lain dengan aturan tidak adanya pembatasan-pembatasan baik kuota impor, ekspor maupun pembebanan tarif atau bea masuk atau cukai yang kemudian hal tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi AS (Lia Amalia, 2007).

Kekayaan AS didukung oleh sumber daya yang dimiliki AS. Sumber daya manusia dan alam yang dimilikinya menjadikan negara ini sebagai salah satu produsen terbesar di dunia dimana sumber daya manusia yang terdapat di AS terbukti berkualitas dan menduduki posisi ke tujuh pada tahun 2014 berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan sumber daya alam yang dimiliki AS terkenal akan bijih besi, emas dan tembaga yang mampu menghasilkan barang dan jasa yang bernilai 40 US milyar dollar perharinya Perekonomian AS juga didukung oleh sektor-sektor dominan antara lain industri manufaktur, agrikultur, konstruksi, pertambangan, administrasi publik dan transportasi.

Namun, memasuki tahun 2008, perekonomian AS mengalami perlambatan pertumbuhan. Krisis finansial yang terjadi di tahun 2008 ditandai dengan meningkatnya angka pengangguran di AS dimana pada awal tahun 2007, tingkat pengangguran AS sebesar 4,4% meningkat menjadi 6,8% pada tahun 2008. Hal ini disertai dengan menurunnya daya beli masyarakat AS dan tingginya angka peminjaman kredit subprima masyarakat AS.

Untuk menanggapi krisis ekonomi yang mulai berpengaruh dalam ekonomi eksternal AS, bank sentral AS, *the Federal Reserve* (FED) telah beberapa kali mengeluarkan kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga. Seperti yang dilaporkan media AS bahwa pemerintahnya menurunkan suku bunga menjadi 4,75% pada Agustus 2007. Pemotongan suku bunga tersebut terus dilakukan oleh AS untuk mendorong aktifitas ekonomi, hingga 1,5% pada Oktober 2008. Selain memotong suku bunga, pemerintah AS juga menyumbangkan banyak dana ke pasar modal dan menyelamatkan beberapa perusahaan raksasa AS dari kebangkrutan.

Selain menurunkan suku bunga, AS yang juga merasa memiliki kepentingan ekonomi di negara-negara Asia Pasifik kemudian tertarik untuk melakukan kerjasama melalui organisasi TPP sebagai salah satu upaya untuk mengatasi krisis finansial tahun 2008.

Dengan bergabungnya AS dalam TPP, Dr. Joshua P. Meltzer selaku ketua lembaga analisis perdagangan *Brookings Institution* AS melaporkan bahwa setelah AS bergabung, TPP membantu mengatasi krisis perekonomian AS dengan meningkatkan angka ekspor AS dari 31% di tahun 2008 menjadi 42% di tahun 2017.

Keanggotaan Amerika Serikat

AS bergabung dalam TPP dilatarbelakangi oleh krisis finansial yang bermula pada tahun 2007. Selama bergabung dengan TPP, AS bersama 11 anggota lainnya berkerjasama membicarakan kerangka kerja yang tepat untuk negosiasi, membahas mengenai barang-barang industri, pertanian, telekomunikasi, jasa keuangan, perbaikan sistem pemerintahan, lingkungan, hambatan teknis perdagangan dan pembangunan kapasitas perdagangan (<http://ustr.gov>, pada 10 April 2018). AS berhasil menjadikan TPP sebagai akses pasar yang besar. Hal ini merujuk pada keberagaman geografi wilayah yang dimiliki negara-negara anggota TPP yang menyumbangkan 40 % PDB dunia. Negara-negara yang sebagian besar menyumbangkan PDB dalam TPP adalah Meksiko, Kanada dan Jepang. Ketiga negara tersebut bergabung dalam TPP setelah AS menawarkan untuk bergabung saat pertemuan APEC tahun 2011.

Karena TPP bersifat ekspansif, jika jumlah negara anggota yang berpartisipasi dalam negosiasi TPP bertambah, maka potensi perekonomiannya juga bertambah. Oleh karena itu AS sangat gencar mempromosikan TPP ke negara-negara lain.

Namun, keberhasilan dan keanggotaan AS dalam TPP di masa Barack Obama dianggap belum cukup bagi Donald Trump. Di hari pertama Donald Trump menjabat, TPP adalah kesepakatan pertama yang Donald Trump putuskan untuk keluar. Hal ini dilakukan oleh Trump berdasarkan kepentingan ekonomi AS.

Alasan Amerika Serikat Keluar dari TPP

1. Make America Great Again

Kebijakan "*Make America Great Again*" merupakan upaya untuk membuat negara AS kembali berjaya. Kebijakan ini merupakan visi dan misi Trump yang berdasarkan dari kepentingan ekonomi dan warga negara AS. Pada dasarnya kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di bidang ekonomi AS. Kepentingan warga AS diwujudkan melalui keluarnya AS dari kesepakatan TPP.

Terdapat lima kebijakan yang diambil oleh presiden Trump dalam mengembalikan kejayaan di bidang ekonomi AS. Pertama, berusaha untuk menciptakan 25 juta lapangan kerja baru. Kedua, menargetkan 1 persen dalam pertumbuhan PDB akan menambah 1,2 juta tenaga kerja. Ketiga, melakukan reformasi kebijakan dengan meluncurkan perencanaan pajak pro pertumbuhan yang di dalamnya mengurangi pajak bagi kelas pekerja dan kelas menengah AS secara bervariasi serta memotong pajak korporasi hingga 15 persen. Keempat, menerapkan terobosan dalam regulasi yang modern dengan melakukan deregulasi berbagai peraturan pada masa kepemimpinan sebelumnya, dan yang kelima, mendorong pertumbuhan menjadi rata-rata 3,5 persen per tahun dengan potensi untuk mencapai tingkat pertumbuhan 4 persen (<https://assets.donaldtrump.com>, diakses 19 Agustus 2018).

Dari lima kebijakan Donald Trump yang ditempuh untuk membuat AS kembali berjaya, hanya dua kebijakan yang telah berjalan seperti yang diharapkan. Selama Donald Trump menjabat, dimana kebijakan Trump yang ingin menciptakan 25 juta lapangan kerja baru pada kenyataannya telah berjalan mencapai pertumbuhan tenaga kerja sebanyak 201.000 orang, dan memotong pajak perusahaan di AS menjadi 21% dari angka sebelumnya yaitu 35% pada tahun 2016. Trump juga telah mengganti *Obamacare* dengan *Affordable Care Act* (ACA) yang lebih murah, sementara kebijakan lainnya masih dalam tahap negosiasi (www.seputarforex.com, diakses 02 Februari 2019).

Lima kebijakan yang diambil oleh presiden Trump dalam mengembalikan kejayaan di bidang ekonomi AS tersebut diambil Presiden Trump sebagai bentuk ketidakpuasannya terhadap kondisi perekonomian di masa kepemimpinan presiden sebelumnya yaitu Barrack Obama. Menarik AS dari kesepakatan TPP merupakan salah satu keputusan yang diambil oleh presiden Donald Trump agar perekonomian AS yang sempat terpuruk saat krisis finansial pada masa pemerintahan Barrack Obama tidak akan terjadi lagi di masa pemerintahan Donald Trump (<https://anzdoc.com>, diakses 19 Agustus 2018).

Presiden Donald Trump menyebutkan dua aturan dalam kebijakannya, yaitu “*buy American and hire American*” yang diterjemahkan sebagai “belilah produk Amerika dan pekerjakan warga negara Amerika”. Kebijakan Trump ini mempengaruhi kebijakan luar negeri AS, dimana langkah awal yang telah diambil sebagai bentuk dari kebijakannya ialah menarik AS dari kesepakatan TPP

Presiden Trump meyakini bahwa dengan kebijakan proteksionisnya akan membuat lapangan pekerjaan baru dan kesejahteraan yang akan tetap terjaga untuk jangka yang panjang di dalam negeri AS. Menurutnya, globalisasi dan kesepakatan seperti TPP lebih banyak mendatangkan kerugian karena banyaknya barang impor konsumsi yang murah dan menyebabkan rendahnya gaji pekerja domestik. Trump juga mengatakan bahwa TPP hanya dapat menekan sektor manufaktur AS dan justru membuat jutaan lapangan pekerjaan warga AS hilang serta merugikan perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika, seperti banyaknya tenaga kerja AS yang kehilangan pekerjaannya dikarenakan para pengusaha lebih mencari tenaga kerja yang terjangkau di negara lain yang dimana memang upah tenaga kerja di AS lebih besar dibandingkan dengan negara anggota TPP lain yang masih berkembang.

Saat AS bergabung dalam TPP, para pekerja AS yang beralih keluar negeri mencapai angka 448.000 yang kebanyakan beralih ke negara-negara Vietnam, Singapura dan Malaysia (www.ase.tufts.edu, diakses 26 Mei 2019). Trump berhasil mengembalikan para pekerja buruh AS kembali sebanyak 15.250 pekerja. Sebagian besar dari para pekerja buruh ini diserap dan diperkerjakan di perusahaan Liberty Tabletop, sebuah perusahaan manufaktur AS yang bergerak di bidang furnitur.

Keputusan Donald Trump menarik AS dari TPP, menurut Trump hal tersebut merupakan strategi untuk melindungi tenaga kerja AS. Hal ini dilakukan agar tenaga kerja dan perusahaan AS yang beralih keluar negeri dapat diminimalisir dan kembali ke AS sehingga AS hanya merekrut para tenaga kerja warga AS saja (www.tribunnews.com, diakses 07 Desember 2017).

2. Pro dan Kontra TPP di Kalangan Publik

Saat AS bergabung dalam TPP, perekonomian AS dapat dikatakan cukup stabil dan tingkat lapangan pekerjaan terus meningkat. Namun, hal tersebut juga disertai dengan terus kehilangan pekerjaan manufaktur dimana upah pekerja warga AS dibayar rendah.

Diantara negara anggota TPP, negara AS adalah negara dengan angka gaji terbesar yang pendapatannya berkisar 700 juta per tahun dengan jam kerja 40 jam per minggu, sedangkan negara anggota lainnya hanya mencapai angka kurang lebih 500 juta pertahunnya (www.worlddata.info, diakses 26 Mei 2019). Hal ini kemudian mengakibatkan tingginya kesenjangan antara kaya dan miskin.

Kesenjangan antara kaya dan miskin ini kemudian menimbulkan pro dan kontra, terutama dikalangan pekerja dan buruh AS. Bahkan sebelum AS bergabung dalam TPP, tidak sedikit orang dari berbagai kalangan yang tidak menyetujui kerjasama TPP. Banyak kalangan yang pro dan kontra dalam menanggapi kerjasama ini.

Hart Research Associates and Chesapeake Beake Consulting melaporkan pihak yang pro terhadap TPP ialah perusahaan-perusahaan besar, seperti perusahaan multinasional, manufaktur *Dow Jones Industrial*, *Apple Inc* dan *Caterpillar Inc*, perusahaan farmasi *Abbott* dan perusahaan pertanian *John Deere*. Sedangkan pihak yang kontra ialah pihak yang merasa dirugikan dengan adanya kesepakatan TPP, yaitu pihak buruh yang dipekerjakan oleh perusahaan dan UMKM. Survei yang dilakukan oleh *Hart Research Associates and Chesapeake Beake Consulting* pada tahun 2008 yang menyatakan bahwa 63% publik AS menentang kerjasama dengan TPP dan 37% lainnya menyetujui kerjasama tersebut. Kesepakatan yang didukung oleh mantan presiden Barack Obama ini telah mengecewakan para pekerja AS karena telah mengalihkan lebih banyak pekerjaan ke luar negeri (<https://player.slideplayer.com>, diakses 01 Agustus 2018).

Sebagian besar publik AS menganggap bahwa TPP hanya menguntungkan bagi perusahaan yang besar dan cenderung merugikan bagi perusahaan kecil. Menanggapi hal ini, presiden Trump mengambil keputusan yang cukup kontroversial karena TPP sendiri adalah perjanjian yang diresmikan dan sangat didukung oleh mantan presiden Barack Obama yang merupakan strategi untuk membendung pasar Cina yang telah mendominasi pasar Asia.

Strategi Trump dengan menarik AS dari kesepakatan TPP bertujuan untuk mendorong perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu, hal ini bertujuan agar perjanjian perdagangan di masa depan akan fokus pada

kepentingan masyarakat AS dan bukan sebaliknya. Menurut Trump, kesepakatan seperti TPP selama ini hanya memuat kepentingan bagi perusahaan-perusahaan besar, terutama perusahaan multinasional, manufaktur, farmasi dan pertanian. Menurut presiden Trump, keputusannya untuk keluar dari kesepakatan TPP dapat meminimalisir persaingan dalam mencari pekerjaan dengan negara lain. Sementara di AS sendiri jumlah pengangguran masih cukup banyak, dengan keluarnya AS dari TPP ini akan membuat warga AS lebih mudah mendapatkan pekerjaan karena persaingan dengan pekerja luar akan berkurang dan jika tidak ada pekerja luar yang ikut mendaftar kerja di AS maka akan lebih memudahkan pekerja lokal mendapatkan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di AS (<https://parstoday.com>, diakses 21 Agustus 2018).

3. Kebijakan Proteksionisme Donald Trump

Kebijakan proteksionisme Donald Trump adalah kebijakan yang melindungi perekonomian AS dengan cara membatasi tarif barang impor di bidang perdagangan AS. Tidak hanya perlindungan di bidang ekonomi, namun juga keseluruhan inti dari slogan “*America First*”, diantaranya pajak, keuangan publik, lapangan pekerjaan, suku bunga, *Obamacare*, imigrasi serta perubahan iklim (<https://katadata.co.id>, diakses 02 Februari 2019).

Untuk penerapan proteksionis perdagangan AS, Trump telah menerapkan proteksi di komoditi perdagangan baja dan aluminium dengan menaikkan tarif impor baja sebesar 25% dan aluminium sebesar 10%. Trump juga menghindari kerjasama multilateral yang adanya pengalihan bisnis atau *outsourcing* ke negara-negara yang berbiaya rendah. Hal tersebut diwujudkan dengan keluarnya AS dari TPP.

Kebijakan proteksionis Donald Trump mulai berlaku di hari pertama Donald Trump menjabat yang meliputi keluarnya AS dari kesepakatan TPP yaitu pada tanggal 23 Januari 2017 dan kesepakatan multilateral lainnya yang Trump anggap hanya merugikan perekonomian AS. Dengan keluarnya AS dari TPP dan kesepakatan lainnya, maka Donald Trump dapat menerapkan kenaikan tarif impor di AS untuk memacu perekonomian AS. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dari proteksi Donald Trump agar produk lokal AS dapat bersaing dan menjadikannya unggul di antara negara lainnya (www.republika.co.id, diakses 05 September 2018).

Kebijakan proteksionisme Trump yang mengatasnamakan kepentingan ekonomi ini dipengaruhi oleh logika berfikir yang disebut dengan proses intelektual dalam teori pengambil keputusan aktor rasional yang bersifat individu. Dikatakan individu, karena dalam pengambilan keputusannya, Donald Trump cenderung memutuskan secara pribadi tanpa dipengaruhi oleh keputusan pihak lain. Oleh karena itu, melalui keputusan presiden Donald Trump yang bersifat individu, pada tanggal 23 Januari 2017 AS keluar dari kesepakatan TPP.

Terhitung setahun setelah keluarnya AS dari TPP, kebijakan proteksionisme Trump yang ingin membuat AS kembali berjaya ini menghasilkan perubahan

yang tidak signifikan. Angka pengangguran yang tadinya mencapai angka 4,1 % di tahun 2017 kini mencapai angka 3,9 % di awal tahun 2019. Banyak pihak yang tidak begitu puas dengan pencapaian ini terutama para ekonom AS, dan AS juga masih kesulitan untuk menghadapi dominasi perekonomian Cina (Siswanto, 2018). Mengingat salah satu alasan bergabungnya AS dalam TPP ialah untuk membendung ekspansi Cina dengan negara-negara anggota TPP yang mempresentasikan 40% PDB dunia di dalamnya, membuat Donald Trump mempertimbangkan untuk bergabung kembali dalam TPP (www.cnbcindonesia.com, diakses 28 April 2019).

Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis dan pembahasan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa keluarnya AS dari kesepakatan TPP yang dilakukan oleh Donald Trump merupakan alternatif kebijakan yang diambil untuk memperoleh keuntungan secara maksimal. Rasionalitas Trump mengambil kebijakan untuk keluar dari TPP ialah untuk menghindari hilangnya pekerja AS dan agar dapat membatasi tarif impor sehingga AS mampu bersaing serta membendung ekspansi negara Cina. Keputusan ini dianggap dapat membuat suatu keuntungan. Keuntungan ini dilihat oleh Trump sebagai kesempatan untuk meningkatkan sektor manufaktur AS. Dengan keberhasilannya dalam meningkatkan sektor manufaktur AS, maka akan memenuhi visi dan misi Trump yang ingin membuat AS kembali berjaya, menyelesaikan pro dan kontra TPP dikalangan publik serta menanggukkan kebijakan proteksionisme. Trump telah merealisasikan 2 kebijakan yaitu pertumbuhan tenaga kerja dan pemotongan pajak perusahaan di AS. Trump juga membatasi tarif barang impor komoditi perdagangan baja dan aluminium.

TPP memang dapat dikatakan berhasil menyokong perekonomian AS yang sempat mengalami krisis di tahun 2008. Namun, keluar dari TPP menurut Trump akan lebih menguntungkan bagi warga negara AS. Oleh karena itu, Trump memutuskan untuk keluar dari kesepakatan TPP agar tujuan untuk membuat AS kembali berjaya dapat terwujud.

Daftar Pustaka

Buku

Amalia, Lia, *Ekonomi Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007.

Elms, Deborah d. C. L. L., *The Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) Negotiations: Overview and Prospects*, Rajaratnam School of International Studies, 2012.

Williams, Brock R, *Trans-Pacific Partnership (TPP) Countries: Comparative Trade and Economic Analysis*, Congressional Research Service, 2012.

Internet

Apa Kabar TPP dan RCEP, diakses dari: http://koran-sindo.com/page/news/2016-05-18/02/Apa_Kabar_TPP_dan_RCEP_

Average Income Around the World, diakses dari: <https://www.worlddata.info/average-income.php>

CNBC Business News and Finance, diakses dari: <https://www.google.co.id/amp/s/www.cNBC.com/amp/2019/01/23/fic-partnership-and-how-does-it-work.html>

Ide Proteksionisme Trump: Border Tax dan Proyeksi Dampaknya, diakses dari: <https://www.seputarforex.com/artikel/ide-proteksionisme-trump-border-tax-dan-proyeksi-dampaknya-277527-31>

Ini Alasan Donald Trump Keluarkan AS dari Perjanjian TP, diakses dari: <http://www.tribunnews.com/internasional/2017/01/24/ini-alasan-donald-trump-keluarkan-as-dari-perjanjian-tpp>

Kebijakan Ekonomi Trump: Proteksionisme, Pengangkasan Pajak, Keuangan, di akses dari: <https://katadata.co.id/berita/2016/11/10/kebijakan-ekonomi-trump-proteksionisme-pemangkasan-pajak-keuangan>

Kebijakan Proteksionis Trump Ancam Picu Perang Dagang Global, diakses dari: <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis-global/18/03/04/p52f4y382-kebijakan-proteksionis-trump-ancam-picu-perang-dagang-global>

Perintah Eksekutif: Senjata Andalan Trump Penuhi Janji Kampanye, diakses dari: <https://m.kumparan.com/amp/@kumparannews/perintah-eksekutif-senjata-andalan-trump-penuhi-janji-kampanye>

Prediksi Ekonom Untuk Data PDB Amerika Serikat, diakses dari : <https://www.provitstraining.com/prediksi-ekonom-untuk-data-pdb-amerika-serikat/>

Previous Findings on the Economic Impact of TPP, diakses dari :

<https://ustr.gov/about/TPP/Previous-Findings-Economic-Impact-TPP>

Scoring The Trump Economic Plan: Trade, Regulatory, & Energy Policy Impacts, diakses dari: https://assets.donaldjtrump.com/Trump_Economic_Plan.pdf

Slogan "America First" dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perdagangan Indonesia, diakses dari: <https://anzdoc.com/.../america-first-dan-slogan-dampaknya-terhadap-kinerja-perdagangan-indonesia>

Summary of the Trans-Pacific Partnership Agreement, diakses dari : <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2015/october/summary-trans-pacific-partnership>

"Trans Pacific Partnership Began Today in Australia", diakses dari: <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/round-1-melbourne>

Trump dan Strategi Kejutan dan Panik, diakses dari: http://parstoday.com/id/radio/world-i46223-trump_dan_strategi_kejutan_dan_panik

Trump Pertimbangkan untuk Kembali Masuk Perjanjian TPP, diakses dari: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190313072959-4-10827/trump-pertimbangkan-untuk-kembali-masuk-perjanjian-tpp>

Unemployment, Inequality and Other Risks of the Trans-Pacific Partnership Agreement, diakses dari : http://www.ase.tufts.edu/gdae/policy_research/TPP_simulations.html

Voters' View of the Trans-Pacific Partnership Pact, diakses dari: <https://player.slideplayer.com/14/4474651/#>

Sumber Lainnya

Siswanto, "Kepemimpinan Donald Trump dan Turbulensi Tatanan Dunia", Jurnal, 2018.